

BAB II
GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

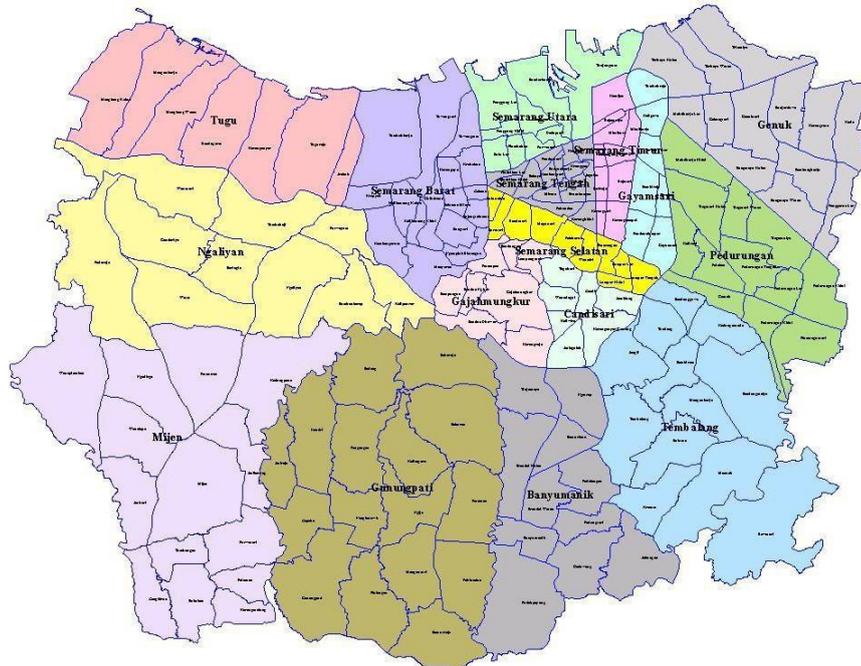
2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Aspek Geografis

Kota Semarang sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 373,70 Km² dan berbatasan di sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, di sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, di sebelah timur dengan Kabupaten Demak, dan di sebelah utara dengan Pulau Jawa. Pulau. mulai dari 13,6 Km hingga 13,6 Km. Semarang memiliki posisi geostrategis di pulau Jawa Indonesia karena penempatannya pada jalur lalu lintas ekonomi pulau dan sebagai komponen dari koridor pembangunan Jawa Tengah, yang terdiri dari empat node gerbang.

177 kecamatan membentuk pemekaran Semarang, yang terbagi menjadi 16 kecamatan. Terdapat dua kecamatan dengan luas daratan terluas yaitu Kecamatan Mijen (57,55 Km²) dan Kecamatan Gunungpati (57,55 Km²), keduanya terletak di bagian utara negara (54,11 Km²). Mereka terletak di bagian selatan provinsi, yang merupakan daerah perbukitan dengan potensi pertanian dan perkebunan, dan yang terutama terdiri dari tanah yang belum dikembangkan. Kecamatan terkecil adalah Kabupaten Semarang Selatan yang memiliki luas wilayah 5,93 Km² dan terletak di dalam kota Semarang.

Gambar 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Semarang.



Sumber : *Badan Pusat Statistika Kota Semarang Tahun 2020 diakses 20 Desember 2021*

Semarang terbagi menjadi enam belas kecamatan, dan 177 kelurahan, dengan luas wilayah 373,70 Km. Terdapat dua (dua) kecamatan dengan wilayah terluas yaitu Mijen (62,15 Km²) dan Gunungpati (53,99 Km²). Kedua kecamatan tersebut terletak di dataran tinggi bagian selatan yang sebagian besar tanahnya merupakan persawahan dan perkebunan. Sedangkan Kecamatan Gayamsari (5,18 Km²) merupakan kecamatan terkecil, sedangkan Kecamatan Candisari (5,55 Km²) adalah yang terbesar. Daerah dataran rendah Kota Semarang sangat sempit, berukuran kurang lebih empat kilometer dari pantai. Kota di bawah ini terletak di dataran rendah ini. Wilayah kota bagian bawah sering tergenang, dan di beberapa wilayah banjir disebabkan oleh luapan air laut (rob). Kecamatan Tugu, Ngaliyan, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang

Selatan, Gajahmungkur, Gayamsari, Pedurungan, dan Genuk semuanya termasuk dalam wilayah kota bawah. Di sebelah selatan terdapat dataran tinggi yang disebut Semarang Atas, yang terdiri dari kecamatan Candi, Mijen, Gunungpati, Tembalang, dan Banyumanik. Pusat pertumbuhan Semarang sebagai pusat aktivitas dan aglomerasi penduduk seolah-olah merupakan kota kecil baru, seperti terlihat di bagian atas kota, dimana perkembangan kawasan Banyumanik sebagai pusat aktivitas dan aglomerasi penduduk membuat kawasan ini agak ramai.

2.1.2 Gambaran Umum Pendidikan di Kota Semarang

Pendidikan sangat penting bagi pertumbuhan suatu bangsa. Pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Karena pendidikan menghasilkan pertumbuhan. Semarang, sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah, diproyeksikan berkembang menjadi pusat pendidikan. Pendidikan sebagian besar di tingkat sekolah menengah, khususnya di Jawa Tengah. Warga Semarang diharapkan memperoleh pendidikan yang layak, dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) dan diakhiri dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tabel berikut memberikan gambaran tentang pendidikan di Kota Semarang:

Tabel 2.1. Data jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta di Kota Semarang

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Mijen	2	2	3	3	5	5
Gunung Pati	1	1	4	4	5	5
Banyumanik	2	2	7	7	9	9
Gajah Mungkur	-	-	6	5	6	5
Semarang Selatan	2	2	3	3	5	5
Candisari	-	-	3	3	3	3
Tembalang	1	1	-	-	1	1
Pedurungan	1	1	4	4	5	5
Genuk	1	1	2	2	3	3
Gayamsari	-	-	3	3	3	3
Semarang Timur	-	-	4	4	4	4
Semarang Utara	1	1	1	1	2	2
Semarang Tengah	2	2	6	6	8	8
Semarang Barat	1	1	12	12	13	13
Tugu	-	-	1	1	1	1
Ngaliyan	2	2	1	-	3	2
Kota Semarang	16	16	60	58	76	74

Sumber: <https://semarangkota.bps.go.id/> diakses November 2021

Berdasarkan tabel di atas terdapat lima kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri diantaranya: Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Candisari, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Tugu. Data terbaru perkembangan sekolah swasta di daerah Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Ngaliyan tidak ada. Dengan adanya kekosongan atau ketidak adanya sekolah pada tiap Kecamatan di Semarang membuat adanya ketimpangan dalam sistem zonasi ini karena ada lima kecamatan yang harus sedikit pindah lebih jauh menginduk pada kecamatan terdekatnya untuk mendapatkan sekolah negeri dan 2 Kecamatan yang tidak terdapat sekolah swasta di lingkup Kecamatan tersebut.

Dari banyaknya sekolah yang ada pada tabel 2.1. SMA yang ada di Kota

Semarang memiliki daya tampung yang masing-masing sekolah berbeda. Jumlah daya tampung dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Daya Tampung Kelas 10 (sepuluh) Satuan Pendidikan SMA Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022

Cabang Dinas Wilayah I Provinsi Jawa Tengah	Nama Sekolah	Peminatan	Daya Tampung		
			Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik Dalam 1 Rombel	Total Daya Tampung
Kota Semarang	SMA N 1 Semarang	MIPA	9	36	324
		IPS	3	36	108
	SMA N 2 Semarang	MIPA	10	36	360
		IPS	2	36	72
	SMA N 3 Semarang	MIPA	10	34	340
		IPS	2	34	68
	SMA N 4 Semarang	MIPA	9	36	324
		IPS	2	36	72
	SMA N 5 Semarang	MIPA	9	34	306
		IPS	2	34	68
	SMA N 6 Semarang	MIPA	8	36	288
		IPS	4	36	144
	SMA N 7 Semarang	MIPA	6	36	216
		IPS	4	36	144
	SMA N 8 Semarang	MIPA	5	36	180
		IPS	5	36	180
	SMA N 9 Semarang	MIPA	7	36	252
		IPS	4	36	144
	SMA N 10 Semarang	MIPA	4	36	144
		IPS	4	36	144
		BAHASA	1	36	36
	SMA N 11 Semarang	MIPA	7	36	252
		IPS	5	36	180
	SMA N 12 Semarang	MIPA	6	36	216
		IPS	5	36	180
		BAHASA	1	36	36
	SMA N 13 Semarang	MIPA	4	36	144
		IPS	4	36	144
	SMA N 14 Semarang	MIPA	5	36	180
		IPS	4	36	144
	SMA N 15 Semarang	MIPA	7	36	252
		IPS	3	36	108
SMA N 16 Semarang	MIPA	3	36	108	
	IPS	3	36	108	

Sumber: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah No. 421/05770 Tentang Penetapan Daya Tampung Kelas 10 (Sepuluh) Pada SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2021/2022

Dengan adanya tabel jumlah daya tampung di atas diharapkan bisa

terpenuhi semua kuotanya. Terpenuhinya kuota daya tampung juga harus diimbangi dengan jumlah tenaga pendidik pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Semarang supaya para pelajar bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang merata. Tenaga pengajar merupakan fasilitator dalam dunia pendidikan terlebih di Kota Semarang. Jumlah tenaga pengajar di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.3. Data Jumlah Tenaga Pengajar Kota Semarang

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Mijen	69	80	33	35	102	115
Gunung Pati	57	71	51	52	108	123
Banyumanik	103	128	99	111	202	239
Gajah Mungkur	-	-	77	77	77	77
Semarang Selatan	135	160	109	109	244	269
Candisari	-	-	55	49	55	49
Tembalang	50	54	-	-	50	54
Pedurungan	72	78	38	53	110	131
Genuk	43	50	28	27	71	77
Gayamsari	-	-	61	61	61	61
Semarang Timur	-	-	80	79	80	79
Semarang Utara	48	54	18	18	66	72
Semarang Tengah	130	145	129	138	259	283
Semarang Barat	51	63	239	251	290	314
Tugu	-	-	43	48	43	48
Ngaliyan	91	113	-	-	91	113
Kota Semarang	849	996	1 060	1 108	1 909	2 104

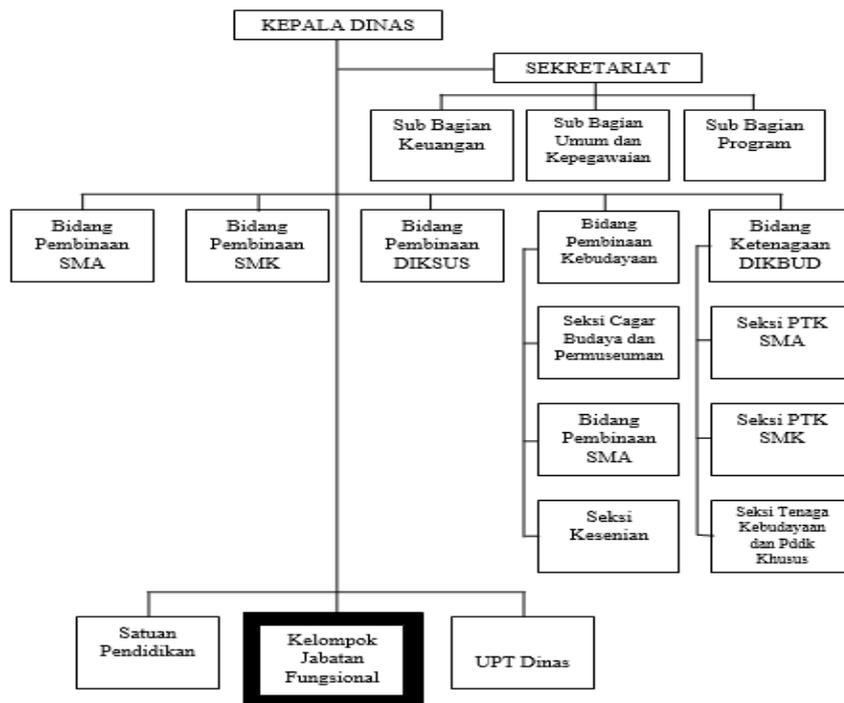
Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id/> diakses 20 November 2021

Berdasarkan Tabel 2.2. tertera jumlah guru pada tiap Kecamatan di Kota Semarang sudah cukup dan memadai untuk memberikan ilmu pada tiap sekolah. Jumlah tenaga pengajar masing – masing Kecamatan dengan jumlah sekolah tiap Kecamatan sudah mencukupi untuk memberikan ilmu bermanfaat dan tenaga pengajar bisa dipastikan berkompeten dalam setiap masing – masing sekolah

tersebut.

2.1.3 Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah diakses 20 November 2021

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

A. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah adalah membina pendidikan Jawa Tengah yang bermoral, kompetitif, dan cinta kasih, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang transparan, akuntabel, dan profesional yang menghasilkan peserta didik yang berkarakter. Berbudi luhur, berdaya saing, dan memiliki rasa identitas nasional yang kuat yang dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

B. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

1. Menumbuhkan budaya kerja berbasis prestasi dan moral di antara semua pejabat sekolah.
2. Menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkelanjutan, adil, dan berkeadilan sesuai dengan otonomi daerah dan tanggung jawab pendampingan.
3. Memberdayakan pendidik yang berkepribadian patriotik.
4. Berusaha menyelenggarakan pelayanan pendidikan secara transparan, efektif, dan efisien.
5. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan nasional.

Sesuai dengan penjelasan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, kebijakan Sistem Zonasi dapat dilaksanakan sesuai dengan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa

Tengah yaitu peningkatan kualitas SDM melalui mutu dan pertanggungjawaban pendidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel yang menghasilkan pelajar yang memiliki akhlak mulia dalam proses seleksi.

Bidang Pemberdayaan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Merupakan unsur pelaksana di bidang pembinaan SMA, berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung terhadap Kepala Dinas. Bidang Pembinaan SMA dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid).

Tugas:

- 1) Mengembangkan kebijakan di bidang pembinaan SMA.
- 2) Mengawasi pembuatan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan SMA.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tanggung jawab pembinaan dan pemantauan di bidang pembinaan SMA.
- 4) Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan SMA.
- 5) Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengawasi pendirian SMA lintas kabupaten/kota.
- 6) Melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan SMA atas nama Pemerintah Daerah.
- 7) Melaksanakan tanggung jawab resmi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.